

DAFATAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto 2011, *Hukum Pelayan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, dalam Sirajudin Dkk 2011, Malang, Setara Press.
- H.Amin Ibrahim, 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Bandung, Manda Maju.
- H.Muh. Jufri Dewa, 2011, *hukum administrasi negara dalam perspektif pelayanan publik*.
- H. Hadari Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga.
- HAWWidjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasinya*, Yogyakarta, Gava Media
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Ujungberung – Bandung, Nuansa.
- Johan Erwin Isharyanto, Bagus Sarnawa, 2010, *Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Jl. Lingkar Barat Tamantirto Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lijan poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasinya*.
- M. Mas'ud Said 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, press malang.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Sirajuddin dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Grafindo.
- SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara.

Sarundang,2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerh*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Victor Situmorang , Jusuf Juhir,1998,*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*,Jakarta,Rineka Cipta.

Wahyudi Kumorotomo,2011, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta , rajawali Pers.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo.

Sumber dari internet

Syamsuri,Tentang Pelayanan Publik dan Pola Pelayanan publik , 18 oktober 2013 , tentangpelayananpublik.blogspot.com pelayanan- publik- dan -pola- pelayanan publik.html ., Jam. 23.42.

[Http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=conten&id=181](http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=conten&id=181),17oktober 2013.,Jam 23.43.

Perundang-undangan :

RI.,Undang – undang Dasar 1945.

RI.,Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

RI.,Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.

RI.,Keputusan Menterti Pendayagunaan Aparataur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Keputusan Menterti Pendayagunaan Aparataur Negara Nomor 81 Tahun 1993

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Publik.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Peny

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pasal 4 ayat (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1983
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Pelaksanaan pengawasan oleh aparat
pengawasan fungsional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pemberantasan Korupsi